GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/0734/KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0518/KUM/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan beberapa usulan baru rancangan peraturan kepala daerah dari satuan kerja perangkat daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0518/KUM/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada Lampiran, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

MUHIDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 100.3.3.1/0734/KUM/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 100.3.3.1/0518/KUM/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1.	Peraturan Kepala Daerah	Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
2.	Peraturan Kepala Daerah	Tata Cara Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2025	
3.	Peraturan Kepala Daerah	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan		V	Kewenangan	Biro Administrasi Pembangunan	2025	
4.	Peraturan Kepala Daerah	Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
5.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	2025	
6.	Peraturan Kepala Daerah	Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen	V		Kewenangan	Dinas Perdagangan	2025	
7.	Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaran Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Kearsipan Nasional di Daerah	V		Kewenangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025	
8.	Peraturan Kepala Daerah	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	
9.	Peraturan Kepala Daerah	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2053	V		Kewenangan	Dinas Lingkungan Hidup	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
10.	Peraturan Kepala Daerah	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2042	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2025	
11.	Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	V		Kewenangan	Dinas Perhubungan	2025	
12.	Peraturan Kepala Daerah	Rencana Aksi Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		Kewenangan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2025	
13.	Peraturan Kepala Daerah	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0149 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan		V	Kewenangan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Prov. Kalsel	2025	
14.	Peraturan Kepala Daerah	Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Prov. Kalsel	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
15.	Peraturan Kepala Daerah	Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula	V		Kewenangan	Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Prov. Kalsel	2025	
16.	Peraturan Kepala Daerah	Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2025	
17.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2025	
18.	Peraturan Kepala Daerah	Pos Pelayanan Teknologi Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna	V		Kewenangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025	
19.	Peraturan Kepala Daerah	Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang	V		Kewenangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2025	
20.	Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	
21.	Peraturan Kepala Daerah	Pengelolaan Data Terpadu Sosial Banua	V		Kewenangan	Dinas Sosial	2025	
22.	Peraturan Kepala Daerah	Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
23.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	
24.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Tata Tertib Penghuni Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Prov. Kalsel	2025	
25.	Peraturan Kepala Daerah	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	V		Kewenangan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Prov. Kalsel	2025	
26.	Peraturan Kepala Daerah	Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Prov. Kalsel	2025	
27.	Peraturan Kepala Daerah	Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025	
28.	Peraturan Kepala Daerah	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026		V	Kewenangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
29.	Peraturan Kepala Daerah	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	V		Kewenangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025	
30.	Peraturan Kepala Daerah	Tata Kelola Daftar Kehadiran Aparatur Sipil Negara	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	
31.	Peraturan Kepala Daerah	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	
32.	Peraturan Kepala Daerah	Perjalanan Dinas	V		Kewenangan	Biro Organisasi Setda Prov. Kalsel	2025	
33.	Peraturan Kepala Daerah	Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai Martapura melalui Program Martapura Asri Tahun 2025-2030	V		Kewenangan	Dinas Lingkungan Hidup	2025	
34.	Peraturan Kepala Daerah	Penanganan Persampahan sebagai Upaya Percepatan Target Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	V		Kewenangan	Dinas Lingkungan Hidup	2025	
35.	Peraturan Kepala Daerah	Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V		Kewenangan	Dinas Lingkungan Hidup	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
36.	Peraturan Kepala Daerah	Aksi Adaptasi dan Mitigasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir	V		Kewenangan	Dinas Lingkungan Hidup	2025	
37.	Peraturan Kepala Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Biro Perekonomian, Setda Prov. Kalsel	2025	
38.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Kehutanan	2025	
39.	Peraturan Kepala Daerah	Fasilitasi Penanganan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Mental atau Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar	V		Kewenangan	Dinas Kesehatan	2025	
40.	Peraturan Kepala Daerah	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
41.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	V		Perintah Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Dinas Kehutanan	2025	
42.	Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Resistensi Antimikroba	V		Kewenangan	Dinas Kesehatan	2025	
43.	Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025	
44.	Peraturan Kepala Daerah	Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Sekolah Kedinasan	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	
45.	Peraturan Kepala Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	V		Kewenangan	Biro Organisasi, Setda Prov. Kalsel	2025	
46.	Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	V		Kewenangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2025	

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
47.	Peraturan Kepala Daerah	Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat	V		Kewenangan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2025	
48.	Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	V		Kewenangan	Dinas Sosial	2025	
49.	Peraturan Kepala Daerah	Pengadaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah	V		Kewenangan	Badan Kepegawaian Daerah	2025	
50.	Peraturan Kepala Daerah	Sistem Pembelajaran Terintegrasi *Corporate University* dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	V		Kewenangan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2025	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

MUHIDIN